

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Setelah melakukan penelitian mengenai pelaksanaan program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) di Kecamatan Siborongborong tahun 2020, maka dapat disimpulkan sebagai berikut ini :

1. Pelaksanaan program BPNT tahun 2020 di Kecamatan Siborongborong belum terealisasi dengan baik. Hal ini dikarenakan program BPNT yang dilaksanakan belum tepat sasaran dan belum merata. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang sudah memenuhi kriteria, namun tidak terdaftar sebagai penerima bantuan. Selain itu ditemukan juga masyarakat yang ekonominya sudah baik atau dapat disebut tidak layak sebagai penerima BPNT, namun terdaftar sebagai penerima bantuan. Masyarakat berharap adanya sensus rutin yang dilakukan oleh pemerintah agar bantuan yang diberikan tepat pada sasaran yang membutuhkan.
2. Kendala dalam pelaksanaan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) di kecamatan Siborongborong tahun 2020. Adapun yang menjadi kendala dalam pelaksanaan BPNT di Kecamatan Siborongborong tahun 2020 yaitu : Pertama, kurang updatenya data penduduk. Data yang diambil sebagai penentu lolosnya sebagai penerima BPNT merupakan data beberapa tahun silam. Data yang sudah kadaluwarsa menyebabkan banyak masyarakat yang sudah

memenuhi kriteria sebagai penerima BPNT namun tidak terdaftar. Begitu juga dengan sebaliknya masyarakat yang tidak layak menerima bantuan namun terdaftar sebagai penerima BPNT. Hal ini disebabkan data yang digunakan merupakan data lama, dimana masyarakat yang sebelumnya mengalami kesulitan ekonomi telah mengalami kemajuan beberapa tahun belakangan. Kedua, minimnya sosialisasi terhadap masyarakat. Kurangnya sosialisasi pemerintah setempat terhadap masyarakat menyebabkan sebagian masyarakat kurang mengetahui peraturan yang ada pada saat pelaksanaan program BPNT. Ketiga, kurangnya informasi terhadap masyarakat terkait hal-hal yang mungkin akan terjadi, seperti hangusnya bantuan jika tidak melakukan penarikan dana bantuan pada kartu elektronik di saat hari pembagian bantuan. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui hal tersebut. Keempat, kurangnya stok sembako di E-Warong. Stok sembako yang tidak sesuai atau tidak memenuhi kuota penerima BPNT turut menjadi masalah yang serius bagi masyarakat. Akibatnya banyak masyarakat yang kesulitan karena sudah meluangkan waktu hingga menyewa kendaraan karena jarak tempuh dari rumah masyarakat ke E-Warong sangat jauh. Keluhan terkait masih banyaknya masyarakat yang sudah memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan namun tidak terdaftar juga turut menjadi masalah serius.

## 5.2 Saran

Setelah melakukan penelitian, adapun yang menjadi saran yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :

1. Perlu diadakan pendekatan antara pemerintah dengan masyarakat. Hal ini bertujuan agar pemerintah lebih memahami apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dan lebih mengetahui setiap keluh kesah masyarakat. Dengan demikian kesalahpahaman diantara kedua belah pihak bisa terhindarkan.
2. Penting dilakukan sosialisasi yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat mengenai tata cara pembagian Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Pemerintah juga perlu memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak menuntut Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) apabila sudah mendapat bantuan lain seperti PKH.
3. Alangkah baiknya masyarakat yang ekonominya stabil namun terdaftar sebagai penerima BPNT mengundurkan diri dan memberikan jatahnya kepada orang yang lebih pantas menerima bantuan tersebut.
4. Pemerintah perlu memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman. Hal ini juga bertujuan untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti dapat hangusnya BPNT.

5. Ada baiknya stok di E-Warong diperbanyak agar masyarakat yang sudah meluangkan waktu dan datang jauh demi mendapat sembako.



THE  
*Character Building*  
UNIVERSITY